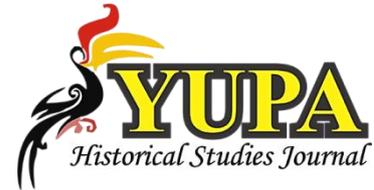


P-ISSN: 2541-6960; E-ISSN: 2549-8754

Yupa: Historical Studies Journal

Vol. 5 No. 2, 2021 (46-60)

<http://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/yupa>



Nasionalisasi-Investasi Perusahaan Asing, Mafia Berkeley dan Berakhirnya Rezim Presiden Soekarno

Asyrul Fikri¹, Anju Nofarof Hasudungan²

¹Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

²SMAN 1 Rupert, Bengkalis, Indonesia

¹asyrul.fikri@lecturer.unri.ac.id, ²anjuhasudungan81@guru.sma.belajar.id

Received	Accepted	Published
31/21/2021	08/03/2022	10/04/2022

Abstract *This study aims to describe the process of nationalizing foreign companies under President Soekarno and stalled during President Soeharto's era which was driven by the thoughts of economists who supported Soeharto, they were called the Berkeley mafia. This research uses historical method with heuristic, verification, interpretation and historiography stages. The primary data used are contemporary magazines, archives and laws. After the fall of Soekarno, the anti-foreign attitude was not continued by his successor, Suharto. The entry of foreign investment through Foreign Investment Law No 1/1967 is proof of Suharto's alignment with foreigners. The foreign investment policy was realized because of the initiative of Indonesian economists who were affiliated with the United States and in the name of the poor economic recovery at that time. The impact of unfair foreign investment has made the Indonesian economy far from what the nation's founders and the 1945 Constitution had hoped for.*

Keywords: *Soekarno, Soeharto, Berkeley Mafia, Foreign Investment*

Abstrak *Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nasionalisasi perusahaan asing di masa Presiden Soekarno dan terhenti di masa Presiden Soeharto yang dimotori oleh pemikiran ekonom-ekonom yang mendukung Soeharto, mereka disebut mafia Berkeley. Penelitian ini menggunakan metode historis dengan tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Data primer yang digunakan, seperti majalah sezaman, arsip dan undang-undang. Nasionalisasi perusahaan asing pernah dilakukan oleh Soekarno, hanya saja tidak dilanjutkan, karena telah lengsernya Soekarno. Setelah lengsernya Soekarno, sikap anti asing tidak dilanjutkan oleh Soeharto. Masuknya investasi asing melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) No 1/1967 adalah bukti keberpihakan Soeharto atas asing. Hal tersebut terjadi karena adanya dorongan ekonom-ekonom Indonesia yang berafiliasi dengan Amerika Serikat atas nama perbaikan ekonomi yang morat-marit hasil peninggalan pemerintahan Soekarno. Dampak investasi asing yang tidak adil membuat ekonomi Indonesia jauh dari yang diharapkan oleh pendiri bangsa dan Undang-undang Dasar 1945. Kekayaan alam Indonesia bukan lagi semata-mata untuk kesejahteraan rakyat.*

Kata kunci: *Soekarno, Soeharto, Mafia Berkeley, Investasi Asing*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, kata nasionalisasi menjadi jargon dari elit politik untuk mendapatkan dukungan masyarakat dalam pemilihan umum (Pemilu), khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres), misalkan nasionalisasi Freeport. Beberapa tahun lalu, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu merenegosiasi (tidak nasionalisasi) kepemilikan saham Freeport hingga akhirnya Freeport melepaskan sahamnya kepada pemerintah Indonesia sebesar 51 % (Yoesry, 2019). Di lain sisi, banyak juga pengamat mengatakan mustahil untuk menasionalisasikan Freeport karena konsekuensinya dapat menjatuhkan rezim yang berkuasa, mengingat banyaknya kepentingan politik ekonomi baik di tingkat nasional maupun global.

Secara historis, nasionalisasi perusahaan asing, elit politikus-ekonom dan eksistensi suatu pemerintahan telah menjadi bagian dari dinamika perjalanan bangsa ini. Seperti, di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Kasusnya adalah wacana nasionalisasi secara paksa oleh Presiden Soekarno, sentiment anti investasi asing serta geopolitik Perang Dingin membuat pemerintahan Presiden Soekarno jatuh (Wardaya, 2021). Wacana nasionalisasi perusahaan asing secara paksa oleh Presiden Soekarno dan PKI dikarenakan ketidakmampuan pemerintah membayar ganti rugi sesuai kesepakatan yang ada, ditambah sentimen Anti Asing dan Irian Barat makin menguatkan wacana tersebut

Dalam tulisan ini, penulis akan mengkaji nasionalisasi perusahaan asing di masa Presiden Soekarno telah menjadi ancaman bagi perusahaan swasta asing sehingga pihak asing tersebut berencana untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Soekarno dan merombak *grand design* perekonomian Orde Lama (Pemerintahan Soekarno) melalui Mafia Berkeley (bentukan Amerika Serikat).



Gambar 1. Peta Konsep Mafia Berkeley, Investasi Asing dan Soekarno

Embrio nasionalisasi adalah “Indonesianisasi” dan inisiatif nasionalisasi semua berasal dari rakyat, terutama yang terkait dengan pendukung partai-partai politik. Kanumoyoso (2001)

mengatakan, bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai politik yang banyak menggerakkan pendukungnya untuk melakukan pengambilalihan aset-aset milik asing tersebut. Semangat nasionalisasi oleh rakyat Indonesia semakin menguat setelah terjadinya Konferensi Meja Bundar. Dengan kesepakatan yang dihasilkan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, maka pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia dan menarik kembali tentaranya ke negeri Belanda. Konsekuensi diantaranya, kepentingan-kepentingan ekonomi Belanda terus mendapat jaminan setelah adanya pengakuan kemerdekaan Indonesia. Sebagian besar sektor modern di Indonesia yang menghasilkan 25% GDP Indonesia dan memberikan lapangan pekerjaan sekitar 10% dari total lapangan kerja masih dimiliki dan dikontrol oleh Belanda (Higgins, 1990).

Ketentuan perundingan KMB, bahwa perkebunan milik asing dikembalikan, sedangkan perkebunan milik Pemerintah Kolonial diambil alih oleh pemerintah RI, begitu pula milik asing yang tidak akan dieksploitasi lagi oleh pemerintah (Kartodirdjo & Suryo, 1991). Tetapi di kemudian hari, munculnya ide untuk menasionalisasi perusahaan milik asing. Dengan tujuan utama pemerintah Indonesia adalah lebih memperkokoh potensi ekonomi nasional Indonesia, juga untuk melikuidasi kekuasaan ekonomi kolonial, dalam hal ini ekonomi kolonial Belanda (Lindblad dalam Wasino, 2016). Perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi pada dasarnya adalah segala perusahaan milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia, baik pusatnya maupun cabangnya.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 86 tahun 1958, pada tahun 1959 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 tentang pokok-pokok pelaksanaan UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Perusahaan Milik Belanda. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959 (dalam Silvianna, 2020), menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan milik Belanda yang dapat dikenakan nasionalisasi adalah: Pertama, perusahaan yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik perseorangan warga negara Belanda dan bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia; Kedua, perusahaan milik sesuatu badan hukum yang seluruhnya atau sebagian modal perseroannya atau modal pendiriannya berasal dari perseorangan warga negara Belanda dan badan hukum itu bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia; Ketiga, perusahaan yang letaknya dalam wilayah RI dan merupakan milik sesuatu badan hukum yang bertempat kedudukan dalam wilayah negara kerajaan Belanda. Sementara itu perusahaan-perusahaan yang dikenakan nasionalisasi, termasuk seluruh harta kekayaan dan harta cadangan, hak-hak dan tagihan-tagihan. Namun tidak dijelaskan apakah hak-hak ini harus terletak di dalam wilayah Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 (Wasino et al., 2014).

Persoalan penting terkait lain dari proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia adalah persoalan ganti rugi. Untuk Kepentingan tersebut dibentuklah Panitia Penetapan ganti kerugian, tugasnya mengurus persoalan ganti bagi perusahaan-perusahaan asing yang terena dampak nasionalisasi (Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1959) (Ferliadi, 2014). Secara aturan, nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing memang sudah dibuat sedemikian detail. Akan tetapi, dalam implementasinya proses ganti rugi dalam rangka nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing tidak selalu berjalan mulus. Persoalan ketersediaan dana pemerintah, konflik politik antara Indonesia-Belanda yang menyangkut Irian Barat (Papua), dan resistensi politik dalam negeri terhadap Belanda merupakan faktor-faktor penghambat proses ganti rugi tersebut (Wasino, 2016).

Proses nasionalisasi ternyata menimbulkan konsekuensi secara hukum, politik dan ekonomi yang luar biasa. Persoalan ganti rugi akibat pengambilalihan aset perusahaan asing tersebut menjadi perusahaan milik pemerintah Indonesia. Setelah terbentuk Badan Nasionalisasi baru dirasakan, bahwa dana yang diperlukan untuk ganti rugi sangatlah besar, padahal banyak diantara perusahaan tersebut yang nilai ekonominya sudah tidak sepadan dengan ganti rugi yang harus diberikan (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, 2015). Akibatnya pada tahun 1960-an muncul wacana untuk tidak membayar ganti rugi dari perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi tersebut. Wacana itu didengungkan terutama dari partai-partai politik pendukung Soekarno, taruhlah PNI dan PKI (Wasino, 2016). Wacana tersebut menjadi ketakutan tersendiri bagi perusahaan yang akan dinasionalisasi terlebih dengan kondisi geopolitik nasional dan global yang menguntungkan kelompok kiri komunisme, seperti:

1. Menguatnya pengaruh PKI dan menjadi pendukung kuat Presiden Soekarno. Konsekuensinya, PKI mendapatkan keuntungan dari Presiden Soekarno dalam sistem Demokrasi Terpimpin.
2. Tahun 1947-1991, Indonesia menjadi bagian geopolitik Perang Dingin antara Uni Soviet berideologi Komunisme dan Amerika Serikat berideologi Kapitalisme-Liberalisme.
3. Diterapkannya sistem Demokrasi Terpimpin kekuasaan Presiden Soekarno sangatlah besar sehingga Blok Barat dalam hal ini Amerika Serikat dan Belanda khawatir Presiden Soekarno menjadi bagian Blok Timur.
4. Konfrontasi dengan Malaysia.
5. Terlebih permasalahan Irian Barat menjadi sentimen Anti Barat.

6. Ditemukannya gunung emas dan tembaga (Freeport) di Irian Barat serta keinginan perusahaan swasta asing menguasainya. Dilain sisi, Presiden Soekarno sangat anti investasi asing dan ingin bangsa sendiri yang mengelolanya.

Sejarah nasionalisasi perusahaan asing, masuknya investasi asing serta perkembangan (kebijakan) ekonomi di masa Presiden Soekarno dan Soeharto harus dapat dimaknai dan menemukan relevansi konteks dengan makna kehidupan masa kini agar pembelajaran terasa manfaatnya (Printina & Hasudungan, 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode historis dengan tahapan pertama heuristik, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan dan data yang terkait dengan topik penelitian ini. Kedua, tahapan verifikasi, hal ini dilakukan dengan maksud agar bahan dan data yang telah dikumpulkan menjadi berkualitas dan layak secara ilmiah (van Drie & van Boxtel, 2008). Ketiga, tahapan interpretasi, setelah tahapan verifikasi selesai dilakukan, maka penulis mulai menafsirkan bahan dan data tersebut dengan memperhatikan teori-teori yang digunakan. Keempat adalah historiografi. Tahapan ini penulis mulai melakukan proses penulisan karya sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan dan dikonsumsi oleh masyarakat ilmiah.

Data yang digunakan adalah jenis primer dan sekunder. Data primer seperti majalah sezaman seperti majalah Tempo dan Ramparts, undang-undang dan arsip yang telah dipublikasikan diberbagai portal pemerintah seperti Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sedangkan untuk data sekunder, yakni buku dan artikel jurnal berkualitas tinggi. Historiografi selain dimengerti sebagai hasil karya sejarah dapat pula dijabarkan sebagai suatu proses penulisan sejarah, bahwa studi hasil tentang karya tulis sejarah. Studi ini pada pokoknya mempelajari ciri-ciri dan kecenderungan dari materi yang ditulis (Zuhdi, 2018). Dalam menganalisis latar belakang nasionalisasi perusahaan asing di masa Soekarno, penulis memperhatikan latar belakang, ideologi, pemikiran, serta kecenderungan-kecenderungan Soekarno dalam melihat asing. Soekarno adalah seorang yang anti asing dalam konteks urusan dalam negeri (menentukan nasib bangsa sendiri). Dia menginginkan anak bangsa yang mengelola kekayaan alam Indonesia. Sedangkan Presiden Soeharto berpandangan bahwa asing dapat terlibat dalam pembangunan ekonomi bangsa dengan mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) No 1/1967. Tentunya ini didorong dengan paradigma ekonom Indonesia lulusan Amerika Serikat yang disebut mafia Berkeley. Menelaah perbedaan latar belakang, ideologi, pemikiran, serta kecenderungan-kecenderungan Soekarno dan Soeharto beserta ekonom Berkeley dalam melihat wacana investasi asing dan menjadi ide besar dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mafia Berkeley

Kekhawatiran pejabat AS tentang nasionalisme ekonomi yang dianut oleh para pemimpin politik Indonesia. Indonesia baru saja mencapai kemerdekaannya dari Belanda secara resmi pada tahun 1949 dan seperti negara-negara baru lainnya, para pemimpin politik dan militer Indonesia pada 1950-an memiliki bias nasionalis yang kuat. Di bidang ekonomi, sentimen nasionalis tercermin dalam tendensi prostat, anti-asing, dan anti-kapitalis negarawan Indonesia, yang akan memperburuk di bawah "demokrasi terpimpin" Soekarno pada akhir 1950-an dan paruh pertama tahun 1960-an (Yasui, 2002).

Sehingga, Amerika Serikat dan sekutunya menggunakan berbagai cara untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Soekarno. Satu diantaranya, menggugat sistem ekonomi pemerintahan Soekarno yang dianggap gagal melalui dosen sekaligus ekonom Universitas Indonesia yang disebut "Mafia Berkeley". Istilah "Berkeley Mafia" atau Mafia Berkeley pertama kali dicetuskan oleh seorang aktivis-penulis 'kiri' AS, David Ransom, dalam sebuah majalah bernama Ramparts, edisi 4 tahun 1970. Istilah ini merujuk pada ekonom-ekonom Indonesia lulusan *University of California, Berkeley* yang menjadi arsitek utama perekonomian Indonesia pada tahun 1960-an. Ramparts adalah sebuah majalah yang awalnya terbit sebagai media literatur kelompok Katolik, tetapi belakangan menjadi media kelompok 'kiri baru". Majalah ini sudah berhenti terbit tahun 1975.



Gambar 1.2 Tulisan David Ransom Mafia Berkeley

Dalam artikel tersebut Ransom menghubungkan Mafia Berkeley dengan proyek AS (terutama CIA) untuk menggulingkan Soekarno, melenyapkan pengaruh komunis di Indonesia, mendudukkan Soeharto di kekuasaan untuk menjalankan kebijakan politik dan ekonomi yang berorientasi pada Barat, hingga mengaitkan Widjojo dan kawan-kawan dengan pembantaian massal eks PKI pada akhir tahun 1960-an (Majalah Tempo, 1971).



Gambar 1.3 Esei Tempo 25 September 1971

Di antaranya mereka adalah Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Adrianus Mooy, JB Soemarlin, Moh Sadli, Soebroto, hingga Emil Salim (Raditya, 2014). Pada dasarnya kelompok Ekonom Berkeley adalah mereka-mereka yang pernah menuntut ilmu di Universitas Indonesia dan Universitas California Berkeley. Mereka mendapatkan beasiswa dari *Ford Foundation* dan *Rockefeller Foundation*. Sebab itulah mereka disebut Kelompok Berkeley.

Pada pertengahan tahun 1950-an, sebagian besar ekonom yang nantinya disebut sebagai Kelompok Berkeley adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI). Saat itu fakultas dipimpin oleh Sumitro Djojohadikusumo, seorang ekonom yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri serta Menteri Keuangan. Sumitro ketika itu adalah satu-satunya dosen yang memiliki gelar doktor ekonomi. Karenanya ia meminta bantuan kawan-kawan dosen dari Belanda dan dari fakultas lainnya untuk membantu pendidikan mahasiswa FE UI. Dia juga merupakan ayah kandung dari menteri pertahanan saat ini, Prabowo Subianto (Purdey, 2016).

Saat tensi antara pemerintah Indonesia dan Belanda sedang tinggi akibat perebutan Irian Barat (sekarang disebut sebagai Papua), para pengajar dari Belanda itu mulai meninggalkan Indonesia. Sumitro meminta bantuan *Ford Foundation*, yang kemudian memutuskan untuk mengadakan program beasiswa di mana beberapa mahasiswa FE UI dipilih untuk dikirim ke luar negeri dan belajar di *University of California, Berkeley*. Program ini dimulai pada tahun 1957 dan beberapa tahun kemudian, pada tahun 1960-an, seluruh mahasiswa yang dikirim telah kembali pulang ke Indonesia. Mereka kemudian ditugaskan mengajar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad). Para sarjana yang dihasilkan oleh kedua proyek ini, satu di bidang ekonomi dan lainnya dalam pembangunan politik, secara efektif sejak saat itu berhasil mendominasi bidang studi tentang Indonesia di Amerika. Sungguh pun demikian, jika dibanding dengan yang terjadi di Indonesia, hasil yang diperoleh tersebut bisa digolongkan

sebagai prestasi yang biasa saja. Melalui Pusat Studi Internasional (*Center for International Studies*) (gagasan Max Millikan dan W. W. Rostow, yang disponsori CIA), Ford bersama MIT membentuk satu tim untuk mempelajari "penyebab stagnasi ekonomi Indonesia" (Hill, 2011).

Pada tahun 1966, Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan di Indonesia dari Presiden Soekarno melalui Supersemar (Hasudungan, 2020). Meskipun belum menjadi presiden hingga dua tahun berikutnya, Soeharto mulai membangun dasar-dasar pemerintahan yang nantinya akan disebut sebagai rezim Orde Baru. Pada akhir Agustus 1966, Soeharto mengadakan seminar di SESKOAD untuk mendiskusikan masalah ekonomi dan politik serta bagaimana Orde Baru akan mengatasi permasalahan itu. Ekonom-ekonom FE UI, yang diketuai oleh Widjojo Nitisastro, mengikuti seminar itu.

Dalam seminar, para ekonom mempresentasikan ide mereka serta rekomendasi kebijakan kepada Soeharto. Soeharto kagum akan ide mereka dan dengan cepat meminta mereka untuk bekerja sebagai Tim Ahli di bidang Ekonomi dan Keuangan. Tokoh sentral Mafia Berkeley adalah Widjojo Nitisastro, yang menjadi Ketua Bappenas sejak Kabinet Pembangunan I pada tahun 1969. Kolega Widjojo, antara lain, Ali Wardhana, Emil Salim, Sumarlin (alumnus Pittsburgh University, tapi mengikuti garis kebijakan Mafia Berkeley), dan Saleh Afiff. Radius Prawiro yang berpendidikan akuntan dari Belanda, juga masuk kelompok generasi pertama Mafia Berkeley (Masud & Mulyadi, 2008).

Widjojo sebagai konseptor dan arsitek utama pembangunan ekonomi Indonesia 1966 – 1997, leluasa menempatkan kolega dan kadernya untuk menduduki posisi penting di berbagai kementerian. Emil Salim, Sumarlin, Saleh Afiff, diorbitkan ke posisi menteri setelah "magang" di Bappenas. Demikian pula generasi ekonom yang lebih muda, mendaki ke posisi empuk di pemerintahan setelah berkarier di Bappenas. Mereka, antara lain, Adrianus Mooy, BS Moelyana, Sudradjad Djiwandono, dan Boediono. Satu-satunya syarat untuk menjadi bagian dari kelompok ini. Yakni, Sekelompok ekonom Indonesia yang "dibina" oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk membelokkan arah perekonomian Indonesia ke jalan ekonomi pasar neoliberal atau kapitalisme. Berdasarkan pandangan-pandangan mereka, kelompok ini juga bisa diklasifikasikan sebagai kelompok nasionalis neoliberal. Beberapa nama yang masuk kedalam kelompok Ekonom Berkeley adalah Emil Salim, Mohammad Sadli, Frans Seda, Dorodjatun Kuncorojakti, dan Boediono (Baswir, 2006). Mereka menganggap ekonomi yang dibangun oleh Presiden Soekarno sudah ketinggalan zaman, kedaluwarsa, dan tidak mampu mensejahterakan rakyat Indonesia. Kondisi ekonomi yang memprihatinkan, ketidakpuasan sosial, kebijakan luar negeri pemerintah yang tidak adil, ketidakpuasan terhadap penguasa, politik yang tidak demokratis, semua dipandang sebagai penyebab gerakan politik mahasiswa.

Pada umumnya gerakan mahasiswa terjalin dengan keresahan masyarakat, kondisi sosial politik yang kritis pada waktu itu dan semakin memburuknya kondisi ekonomi memunculkan suatu angkatan baru yang mendapat kesempatan memainkan peranan (Rakhmat & Najib, 2001). Krisis ekonomi yang dalam dan berkepanjangan, dengan pengangguran skala besar atau inflasi besar dan cepat menjadi faktor yang membuat prakondisi kudeta semakin kuat dan ini sesuai dan relevan dengan situasi dan kondisi di tahun 1960-1967 (Luttwak, 1979).

Berakhirnya Rezim Presiden Soekarno

Secara bertahap Mayjend. Soeharto menggantikan Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara. Proses ini dilaksanakan secara bertahap itu sebab mengapa beberapa pengamat dan sejarawan mengatakan bahwa pengambil kekuasaan yang sabar itu sebagai "*Creeping Coup d'etat*" (Kudeta Merangkak) (Thufail, 2010; Rachman, 2011; Permata, 2016). Perlu penulis sampaikan bahwa pada transisi kekuasaan di pertengahan tahun 1960-70-an, Soeharto hanyalah *primus inter pares*, dari seluruh kekuatan gabungan pendukung Orde Baru yang sebelumnya telah mengalahkan para pendukung Presiden Soekarno (Kadi, 2000). *Primus Inter pares* adalah Sistem Pemilihan pemimpin melalui musyawarah diantara sesamanya berdasarkan kelebihan yang dimiliki baik secara fisik ataupun spiritual. *Primus Inter pares* biasanya berhubungan dengan wibawa seorang tokoh merangkum kepercayaan, mutu tokoh (kemampuan mengorganisasi, tingkat visioner, kemampuan merekam dan memahami mimpi publik dalam program publik kemudian melaksanakannya, menghormati keadilan, pandai mendengar, memecahkan masalah dan pandai mempersatukan). Setelah gagal dengan rencana pembunuhan Presiden Soekarno dan pemberontakan PRRI/Permesta (BBC Indonesia, 2017). Maka, Barat mengganti strategi dengan mengkombinasikan teknokrat (ekonom Mafia Berkeley) dan militer (TNI AD).

Pemberontakan PRRI pada Februari 1958, pihak imperialis AS menyuplai dana, senjata, dan amunisi kepada para pemberontak (Muzaki et al., 2016). Masyumi, partai Islam reformis (memiliki sekitar 20 persen suara pada pemilihan umum 1955) dan Partai Sosialis Indonesia (partai kecil dimana anggota-anggotanya sebagian besar terdiri para kader dan intelektual pembaru) terlibat dalam pemberontakan ini. Selain itu, AS juga mengirimkan barisan kapal perang dari Armada ke-7 untuk daerah pemberontakan. Alasannya: untuk membantu pengungsian pegawai perusahaan minyak AS yaitu, Caltex.

Dari perspektif ini skenario yang ideal barangkali adalah pemerintah yang didominasi oleh para "*modernizer*", seperti Adam Malik, yang akan memaksa Indonesia meninggalkan *statism* menuju liberalism ekonomi. tetapi, model pemerintahan yang kemungkinan terjadinya sangat kecil ini mensyaratkan sebuah revolusi kultural dan adopsi sikap yang sama sekali asing bagi Indonesia. Skenario yang paling mungkin adalah campuran antara ekonomi negara-pasar dan rezim klientelistik yang didominasi

oleh tentara, yang didalamnya kaum “modernizer” diizinkan membentuk kebijakan ekonomi –yaitu rezim militer yang memodernisasi (Simpson, 2010).

Pada 1957, untuk memperkuat perekonomian nasional, Presiden Soekarno bertindak cepat mengambil langkah berani dan cerdas dengan menasionalisasi aset-aset milik Belanda. Soekarno tahu jika rakyat tentu mendukung penuh langkah ini. Namun Soemitro dan Mafia Berkeley yang pro barat dengan berani menentang Presiden Soekarno dan malah bergabung dengan para pemberontak PRRI/PERMESTA yang didukung penuh CIA (Agen Intelijen Amerika Serikat).

Pada sekitar tahun 1961, Presiden Soekarno gencar merevisi kontrak pengelolaan minyak dan tambang-tambang asing di Indonesia. Minimal sebanyak 60 persen dari keuntungan perusahaan minyak asing harus menjadi jatah rakyat Indonesia. Namun kebanyakan dari mereka, gerah dengan peraturan itu. Akibatnya, skenario jahat para elite dunia akhirnya mulai direncanakan terhadap kekayaan alam negeri tercinta, Indonesia. Khususnya, gunung emas dan tembaga di Irian Barat (saat ini Papua) yakni, Freeport. Perubahan eskalasi politik atas tanah Irian Barat tengah mengancam. Hubungan Indonesia dan Belanda telah memanas dan Soekarno malah mulai menerjunkan pasukannya di Irian Barat. Dalam demokrasi terpimpin yang dipakai Soekarno dalam menjalankan kekuasaannya, bidang ekonomi termasuk dalam bidang yang harus terpimpin.

Oleh karena itu, dibuatlah seperangkat konsep yang disampaikan dalam pidato kenegaraan Presiden 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita". Pidato kenegaraan tersebut disahkan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai Garis Besar Hasulan Negara (GBHN) dengan judul Manifestasi Politik (Manipol) yang kemudian dikaitkan akronim USDEK yakni U (UUD 1945), S (sosialis Indonesia), D (demokrasi terpimpin), E (ekonomi terpimpin), K (kepribadian Indonesia). Selanjutnya, diciptakan konsep yang bertujuan untuk merangkul kekuatan politik besar di Indonesia yakni Nasakom (Nasionalis, Agamis, Komunis) (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2016).

Selanjutnya, pimpinan Freeport ingin meminta bantuan kepada Presiden AS John Fitzgerald Kennedy (JFK) agar mendinginkan masalah Irian Barat. Namun ironisnya, JFK malah sepertinya mendukung Soekarno. Kennedy mengancam Belanda, akan menghentikan bantuan *Marshall Plan* jika ngotot mempertahankan Irian Barat (Alfatiry & Sugara, 2019; Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Rencana Marshall atau *Marshall Plan* adalah program ekonomi skala besar pada tahun 1947-1951 oleh Amerika Serikat yang bertujuan membangun kembali kekuatan ekonomi Negara-negara di Eropa setelah Perang Dunia II usai. Inisiatif penamaan diambil dari sekretaris negara George Marshall. Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran akibat

Perang Dunia II, terpaksa mengalah dan mundur dari Irian Barat. Ketika itu sepertinya Belanda tidak tahu jika Gunung Ersberg sesungguhnya mengandung banyak emas, bukan tembaga. Sebab jika saja Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai bantuan *Marshall Plan* yang diterimanya dari AS tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nilai emas yang ada di gunung tersebut.

Maret 1965, Augustus C. Long terpilih sebagai Direktur *Chemical Bank*, salah satu perusahaan Rockefeller. Pada bulan Agustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan penasihat intelijen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri. Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di negara-negara tertentu. Long diyakini salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Soekarno, yang dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang disebutnya sebagai *Our Local Army Friend* (Imron, 2013; Sudjatmiko, 2019). Sedangkan menurut pengamat sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, Soekarno benar-benar ingin sumber daya alam Indonesia dikelola oleh anak bangsa sendiri. Asvi juga menuturkan, sebuah arsip di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengungkapkan pada 15 Desember 1965 sebuah tim dipimpin oleh Chaerul Saleh di Istana Cipanas sedang membahas nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia.

Soeharto yang pro-pemodal asing, datang ke sana menumpang helikopter. Dia menyatakan kepada peserta rapat, bahwa dia dan Angkatan Darat tidak setuju rencana nasionalisasi perusahaan asing itu. Alasan ABRI mengambil alih kekuasaan karena situasi politik dan ekonomi Indonesia saat itu sangat parah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1999). "*Soeharto sangat berani saat itu, Bung Karno juga tidak pernah memerintahkan seperti itu,*" kata Asvi. Sebelum tahun 1965, seorang taipan dari Amerika Serikat menemui Soekarno. Pengusaha itu menyatakan keinginannya berinvestasi di Papua. Namun Soekarno menolak secara halus. "*Saya sepakat dan itu tawaran menarik. Tapi tidak untuk saat ini, coba tawarkan kepada generasi setelah saya,*" ujar Asvi menirukan jawaban Soekarno (Islahudin, 2013).

Presiden Soekarno berencana modal asing baru masuk Indonesia 20 tahun lagi, setelah putra-putri Indonesia siap mengelola (Sirwanto, 2020b). Dia tidak mau perusahaan luar negeri masuk, sedangkan orang Indonesia masih memiliki pengetahuan nol tentang alam mereka sendiri. Oleh karenanya sebagai persiapan, Soekarno mengirim banyak mahasiswa belajar ke negara-negara lain seperti Uni Soviet, Tiongkok, Amerika Serikat (khusus jurusan ekonomi dan dari Ford Foundation), Albania, Hungaria, Rumania, Cekoslovakia, Vietnam, Korea Utara, dan Mesir (Akmaliah, 2015). Presiden Soekarno boleh saja membuat tembok penghalang untuk asing dan mempersiapkan calon pengelola negara. Namun Asvi (dalam Sirwanto, 2020) menjelaskan bahwa usaha pihak luar yang bernafsu ingin mendongkel kekuasaan Soekarno,

tidak kalah kuat! Setahun sebelumnya yaitu pada tahun 1964, seorang peneliti diberi akses untuk membuka dokumen penting Departemen Luar Negeri Pakistan dan menemukan surat dari duta besar Pakistan di Eropa.



Gambar 1.4 Salinan (Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing, 1967)

Pada akhirnya, Pemerintahan Soekarno harus jatuh dan digantikan oleh Presiden Soeharto dan setelah dilantik menjadi presiden langsung membuat UU No. 1/1967 berisi berbagai insentif dan jaminan kepada para calon investor asing (Daniah, 2014; RAS & Suroso, 2020). Di dalamnya termasuk masa bebas pajak dan jaminan tidak adanya nasionalisasi, kecuali dianggap perlu bagi kepentingan nasional dan dengan kompensasi penuh sesuai hukum internasional. Kebijakan pintu terbuka bagi modal asing ini menarik investor baru, terutama dari sektor pertambangan dan manufaktur. Freeport jadi yang pertama masuk, disusul kemudian perusahaan tambang dan kayu dari sejumlah negara. Kekayaan alam dan tenaga kerja murah menjadi mantra pemikat.

KESIMPULAN

Keinginan Presiden Soekarno untuk menasionalisasikan perusahaan dan menolak investasi asing tidak dapat terwujud sepenuhnya, bahkan mengalami kemunduran. Penyebabnya adalah bergantinya rezim berkuasa yang memiliki cara pandang tersendiri dalam mengelola negara termasuk kekayaan alam Indonesia. Setelah menggantikan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto langsung membuka pintu kran investasi asing melalui peraturan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) No 1/1967. Salah satunya yang fenomenal adalah masuknya Freeport untuk mengeksploitasi tembaga dan emas di Papua yang hingga saat ini masih beroperasi. Masuknya investasi asing ke Indonesia di masa Presiden Soeharto tidak lain dan tidak bukan, karena keinginan dari Amerika Serikat dan sekutunya, juga didukung oleh ekonom-ekonom Indonesia yang kuliah di Amerika Serikat, mereka disebut dengan mafia Berkeley. Mereka beranggapan bahwa sistem ekonomi Indonesia di masa Presiden Soekarno

sudah kedaluwarsa, sehingga tidak mampu mensejahterakan rakyatnya. Terlepas setuju atau tidak setuju dengan investasi asing masuk ke Indonesia, nyatanya hingga saat ini pemerintah selalu mengundang asing untuk berinvestasi. Hanya saja saat ini, investasi asing di Indonesia telah berbagai macam jenis dan skema yang diharapkan dapat menguntungkan Indonesia.

REFERENCES

- Akmaliah, W. (2015). Indonesia yang dibayangkan: Peristiwa 1965-1966 dan Kemunculan Eksil Indonesia. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 17(1), 65-76. <http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/view/122>
- Alfatiry, A. R., & Sugara, A. (2019). ENYOAL PERPANJANGAN KONTRAK PT. FREEPORT Suatu Telaahan Kebijakan Publik. *Jurnal Moziak*, XI(2), 72-82. <https://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/view/1024/313>
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2016). *Arsip Nasional RI | Guide Arsip Perjuangan Pembebasan Irian Barat 1949-1969*. <https://anri.go.id/download/guide-arsip-perjuangan-pembebasan-irian-barat-19491969-1600672140>
- Baswir, R. (2006). *Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- BBC Indonesia. (2017). *Dokumen CIA sebut "pembahasan rencana pembunuhan" Presiden Sukarno*. www.Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41711922>
- Daniah, R. (2014). Investasi Asing di Kalimantan Timur dalam Kerjasama Bilateral: Tinjauan Melalui Perspektif Rational Choice. *Insignia Journal of International Relations*, 1(01), 29. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2014.1.01.427>
- Ferliadi, A. S. (2014). *NASIONALISASI PERUSAHAAN MODAL ASING (Studi Prospek Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing Di Indonesia)* [Universitas Islam Indonesia]. https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8527/Agus_S_F_Komplit.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Hasudungan, A. N. (2020). TNI-AD dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dalam Kelengseran Soekarno Tahun 1965-1968. *Yupa: Historical Studies Journal*, 3(1), 28-37. <https://doi.org/10.30872/yupa.v3i1.173>
- Higgins, B. (1990). Thought and Action: Indonesian Economic Studies and Policies in the 1950s. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 26(1), 37-47. <https://doi.org/10.1080/00074919012331335695>
- Hill, D. T. (2011). *Jurnalisme dan politik di Indonesia : biografi kritis Mochtar Lubis (1922-2004) sebagai pemimpin redaksi dan pengarang*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Imron, A. (2013). Analisis Terhadap Kekuatan Bargaining Position Pemerintah Indonesia Dalam Kontrak Karya PT Freeport Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(2), 105-115. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/idjch.v18i2.1115>
- Islahudin. (2013, February 18). Mendongkel kekuasaan Soekarno. *Merdeka.Com*. <https://www.merdeka.com/khas/mendongkel-kekuasaan-soekarno-freeport-bikin-sewot-2.html>
- Kadi, S. (2000). *TNI-AD Dahulu, Sekarang dan Masa Depan*. Pustaka Utama Grafiti.
- Kanumoyoso, B. (2001). *Nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.
- Kartodirdjo, S., & Suryo, D. (1991). *Sejarah perkebunan di Indonesia: kajian sosial ekonomi*. Aditya Media.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). *Hubungan Antar Masyarakat Jadi Kunci*

- Kemitraan Indonesia - Amerika Serikat*. Kemlu.Go.Id. <https://kemlu.go.id/portal/lc/read/447/berita/hubungan-antar-masyarakat-jadi-kunci-kemitraan-indonesia-amerika-serikat>
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (1999). *Tentara Mendamba Mitra*. PPW-LIPI & Mizan Pustaka.
- Luttwak, E. (1979). *Kudeta: Teori dan Praktek Penggulingan Kekuasaan*. Yayasan Bentang Budaya.
- Majalah Tempo. (1971). Dari Kisah The Berkeley Mafia. *Majalah Tempo*.
- Masud, D. A., & Mulyadi, E. (2008). *Rizal Ramli Lokomotif Perubahan: langkah Strategis Dan Kebijakan Terobosan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik*. Cipta Citra Persada.
- Muzaki, M. F., Melay, R., & Kamaruddin. (2016). PERGOLAKAN PRRI DI KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR TAHUN 1958-1961. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 3(2), 1–15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFKIP/article/view/10822>
- Permata, H. (2016). GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965 DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT SEJARAH MARXISME. *Jurnal Filsafat*, 25(2), 220. <https://doi.org/10.22146/jf.12680>
- Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing, Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 1967 (1967). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/38792/UU Nomor 1 Tahun 1967.pdf>
- Printina, B. I., & Hasudungan, A. N. (2020). PEMBELAJARAN SEJARAH ASIA BARAT KUNO BERBASIS PARADIGMA PEDAGOGI REFLEKTIF. *SWADESI: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 1(1), 24. <https://doi.org/10.26418/swadesi.v1i1.43063>
- Purdey, J. (2016). Narratives to power. *South East Asia Research*, 24(3), 369–385. <https://www.jstor.org/stable/26372041>
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. (2015). *LAPORAN AKHIR Penelitian Pola-Pola Konflik Pertanahan Di Wilayah Perkebunan*. https://inlis.atrbpn.go.id/inlislite3/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZjQ2M2ZiMWQwNWU4OGZlZTkYNDkMjY5MDM3YTY5ZmNmN2ZhMzdmMQ==.pdf
- Rachman, N. F. (2011). *The Resurgence of Land Reform Policy and Agrarian Movements in Indonesia* [University of California, Berkeley]. https://digitalassets.lib.berkeley.edu/etd/ucb/text/Rachman_berkeley_0028E_11750.pdf
- Raditya, G. (2014). Menelusuri Jejak Alumni Mafia Berkeley. *Koran Suara Merdeka*. <https://docplayer.info/50590455-Jateng-darurat-bencana-enam-titik-pantura-tergenang-terbesar-dalam-siklus-lima-tahunan.html>
- Rakhmat, A., & Najib, M. (2001). *Gerakan perlawanan dari masjid kampus*. Purimedia.
- RAS, H., & Suroso, J. T. (2020). Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen ...)*, 4(1), 392–408. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/557>
- Silvianna, A. (2020). Grondkaart; Problematika Hukum dan Penyelesaiannya (Analisis Kasus antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT Pura Barutama Kudus Jawa Tengah). *Law, Development and Justice Review*, 3(1), 70–83. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i1.7871>
- Simpson, B. R. (2010). *Economists with Guns Amerika Serikat, CIA, dan Munculnya Pembangunan Otoriter Rezim Oder Baru*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sirwanto, S. (2020a). KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DAN DAMPAK KEDAULATAN BANGSA. *AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 5(1), 84. <https://doi.org/10.29300/imr.v5i1.2919>

- Sirwanto, S. (2020b). KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DAN DAMPAK KEDAULATAN BANGSA. *AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 5(1), 84. <https://doi.org/10.29300/imr.v5i1.2919>
- Sudjatmiko, T. (2019). Ada JFK dan Konspirasi CIA di Balik Tambang Freeport? *Kedaulatan Rakyat Jogja*. <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/ada-jfk-dan-konspirasi-cia-di-balik-tambang-freeport/>
- Thufail, F. I. (2010). *The Social Life of Reconciliation: religion and the struggle for social justice in post-new order Indonesia* (No. 127; Vol. 49, Issue 0). <https://www.eth.mpg.de/pubs/wps/pdf/mpi-eth-working-paper-0127.pdf>
- van Drie, J., & van Boxtel, C. (2008). Historical Reasoning: Towards a Framework for Analyzing Students' Reasoning about the Past. *Educational Psychology Review*, 20(2), 87–110. <https://doi.org/10.1007/s10648-007-9056-1>
- Wardaya, B. T. (2021). The Long Shadow of the Cold War: The Cold War Policies of the United States towards Asia and their Impact on Indonesia. *International Quarterly for Asian Studies*, 52(3–4), 331–347. <https://doi.org/https://doi.org/10.11588/iqas.2021.3-4.13931>
- Wasino, Margana, S., Supriyono, A., Nawiyanto, Juwono, H., Hartatik, E. S., Uddin, B., Shokheh, M., Radjimo, & Priyatmoko, H. (2014). *Sejarah nasionalisasi aset-aset BUMN : dari perusahaan kolonial menuju perusahaan nasional*. Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. [http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/61387/03 Sejarah nasionalisasi.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/61387/03%20Sejarah%20nasionalisasi.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Wasino, W. (2016). NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ASING MENUJU EKONOMI BERDIKARI. *Paramita: Historical Studies Journal*, 26(1), 62. <https://doi.org/10.15294/paramita.v26i1.5146>
- Yasui, S. (2002). *How was the Market Economy Implanted in Developing Countries ? The Cases of Chile and Indonesia*. [https://project.iss.u-tokyo.ac.jp/nakagawa/members/papers/1\(8\)Yasui.final.pdf](https://project.iss.u-tokyo.ac.jp/nakagawa/members/papers/1(8)Yasui.final.pdf)
- Yoesry, E. (2019). DIVESTASI PT. FREEPORT INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), 160. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1915>
- Zuhdi, S. (2018). Historiografi dan Metodologi Sejarah. *Buletin Al-Turas*, 2(2), 61–68. <https://doi.org/10.15408/bat.v2i4.6872>